

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu global yang menjadi perhatian internasional. Konvensi Istanbul hadir sebagai upaya internasional untuk menanggulangi masalah ini. Turki menjadi negara pertama yang meratifikasi konvensi tersebut pada 2011, namun pada 2021, pemerintah di bawah Presiden Erdoğan memutuskan untuk menarik diri. Keputusan ini menuai kritik luas, mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Turki yang terus menunjukkan peningkatan.

Pada level *gendered leadership*, penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul didorong oleh Erdoğan yang tidak berpandangan feminis dan memanfaatkan narasi gender untuk memperkuat kekuasaannya. Erdoğan memiliki pandangan yang tidak percaya dengan feminis, dan selalu mengidentikan perempuan sebagai istri dan pengurus rumah tangga, serta tidak setuju dengan konsep *gender equality*. Erdoğan memanfaatkan narasi konservatif berbasis gender dengan menyebutkan bahwa konvensi ini telah merusak nilai-nilai keluarga Turki. Erdoğan memanfaatkan narasi ini untuk memperkuat dukungannya yang mulai menurun setelah kekalahan pemilu 2018 dan COVID-19.

Selanjutnya, pada level *gendered institutions*, penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul didorong oleh perubahan orientasi kebijakan luar negeri Turki. Perubahan kebijakan luar negeri Turki melalui Neo-Ottomanisme dan *New Turkey* menyebabkan Erdoğan mulai mempromosikan nilai-nilai keluarga dalam kebijakannya. Kebijakan ini mulai mengambil pendekatan anti-barat dan

mengalami de-eropanisasi yang menyebabkan Turki mulai menjauh dari nilai-nilai Uni Eropa, termasuk dengan keluar dari Konvensi Istanbul. Faktor-faktor domestik Turki yang mencakup lemahnya representasi perempuan dan gerakan yang dibatasi memperkuat kecenderungan pemerintah untuk mengabaikan isu-isu gender.

Terakhir, pada level *gendered structures*, penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul didorong oleh kontestasi terhadap norma *gender equality* dan pemimpin populis dan otoriter. Kontestasi terhadap *gender equality* melalui *gender justice* yang dilakukan oleh KADEM menyebabkan perempuan dan laki-laki dipandang sebagai suatu kesatuan dalam keluarga. Hal ini mendorong kelompok konservatif Turki untuk melakukan penolakan terhadap norma kesetaraan gender yang terdapat dalam Konvensi Istanbul karena dianggap merusak struktur keluarga. Melalui populisme, pemerintah Turki membingkai Konvensi Istanbul sebagai ancaman bagi nilai-nilai keluarga dan budaya Turki dan Erdogan sebagai pemimpin yang otoriter mendorong Turki untuk menarik diri secara sepihak dari Konvensi Istanbul melalui dekrit Presiden.

Penarikan Turki dari Konvensi Istanbul didorong oleh strategi politik yang melibatkan isu gender di berbagai level. Dengan menggunakan pendekatan *Gendered Multi-level Games*, bisa dilihat bahwa kebijakan luar negeri Turki dalam penarikan diri dari Konvensi Istanbul dipengaruhi oleh tekanan dari aktor domestik yang konservatif, sekaligus respon terhadap norma internasional tentang kesetaraan gender. Secara keseluruhan, pendekatan *Gendered Multi-level Games* membantu untuk memahami bahwa kebijakan luar negeri tidak netral terhadap gender. Sebaliknya, ia sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, identitas, dan strategi politik di berbagai level.

## 5.2 Saran

Penelitian mengenai faktor-faktor pendorong Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul dengan menggunakan kerangka *Gendered Multi-level Games* memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicatat. Fokus analisis cenderung menitikberatkan pada elite politik, khususnya pemerintah dan partai berkuasa, sehingga suara oposisi, kelompok perempuan, dan masyarakat sipil yang menolak penarikan diri belum dijelaskan secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan temporal karena hanya menyoroti periode sekitar keputusan penarikan diri pada tahun 2021, sehingga perkembangan pasca keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul belum sepenuhnya tercakup. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menganalisis wacana media dan opini publik dapat ditambahkan untuk melihat bagaimana isu penarikan diri dibingkai dan memengaruhi legitimasi kebijakan. Terakhir, penelitian lanjutan dapat dikembangkan untuk menilai dampak penarikan diri terhadap kebijakan domestik terkait kekerasan berbasis gender serta posisi Turki dalam diplomasi internasional mengenai isu hak perempuan.

